

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas dapat dikatakan sebagai suatu tanggung jawab mengenai tindakan, kinerja, dan pengambilan keputusan suatu organisasi yaitu pemerintah kepada pihak yang berhak atas keputusan tersebut yaitu masyarakat (Indraswari & Rahayu, 2021). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, akuntabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur desa (N. K. Dewi & Gayatri, 2019).

Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) kasus korupsi yang melibatkan aparatur desa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sejumlah 676 terdakwa. Kerugian yang dialami oleh negara akibat kasus korupsi yang dilakukan oleh para aparatur desa tersebut mencapai Rp.111.000.000.000,00. Kasus korupsi anggaran desa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.32.300.000.000,00 (Maryono & Amaliya, 2022). Data diatas menunjukkan bahwasannya salah satu kasus korupsi paling banyak yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa.

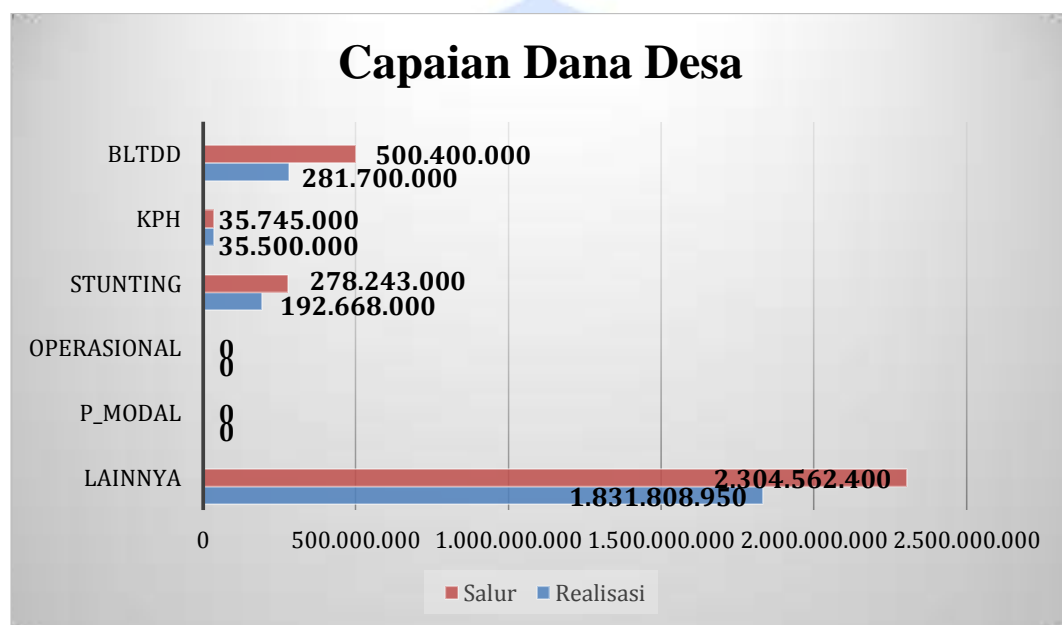
Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan aparatur desa tersebut tidak menutup kemungkinan adanya kasus serupa yang terjadi di Kabupaten Pati. Pasalnya Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten yang memiliki cukup

banyak Kecamatan di dalamnya, salah satunya Kecamatan Juwana. Menurut artikel tren 24 jam kepala desa dukutalit melakukan korupsi dana desa di tahun 2019-2020. Dana desa yang diduga diselewengkan oleh kepala desa dukutalit untuk kepentingan pribadi adalah dana untuk proyek pembangunan rabat beton yang dilaksanakan oleh pihak Bumdesma. Dana yang harus dibayarkan bersumber dari tahun 2019 senilai Rp.136.000.000,00 namun sampai akhir tahun 2020 data tersebut belum dibayarkan kepada pihak Bumdesma (Web, 2020).

Tidak hanya itu, berdasarkan pengakuan dari sekretaris desa dan bendahara desa dukutalit, pajak dana desa tahun 2020 juga belum dibayarkan senilai kurang lebih Rp.50.000.000,00. Adapun kasus penyelewengan dana desa juga terjadi pada desa bumirejo. Dimana penyelewengan dana PNPM diduga dilakukan oleh kepala desa Bumirejo sebesar Rp.250.000.000,00. Berdasarkan kasus yang terjadi pada 2 desa di Kecamatan Juwana tersebut bisa dikatakan bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa yang ada pada desa di Kecamatan Juwana belum begitu optimal.

Data pencapaian dana desa di Kabupaten Pati pada tahun 2023 terdapat pada gambar 1.1. Dimana pada gambar tersebut dijelaskan grafik pencapaian dana desa BLTDD di kabupaten Pati berjumlah Rp.500.400.000 yang disalurkan, sedangkan yang berhasil terealisasi sebesar Rp 281.700.000. Untuk dana KPH yang disalurkan yaitu sebesar Rp.278.243.000 dan yang berhasil direalisasikan yaitu sebesar Rp.35.500.000. Kemudian dana untuk masalah stunting diberikan sebesar Rp.278.243.000 dan yang dapat direalisasikan yaitu sebesar Rp.192.668.000. Dana desa yang bertujuan untuk kegiatan lainnya disalurkan sebesar

Rp.2.304.562.400 dan berhasil disalurkan sebesar Rp.1.831.808.950. Sehingga dapat dipastikan bahwasannya dana yang diterima oleh Kecamatan Juwana yang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pati tidak semua dapat terealisasi.



Sumber : sidesa.jateng.prov.go.id (2023)

Gambar 1.1. Grafik Capaian Dana Desa di Kabupaten pati

Akuntabilitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu mengenai kompetensi aparatur desa. Menurut (Indraswari & Rahayu, 2021) Kompetensi kerja merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperoleh dari pendidikan, keterampilan serta pengalaman. Kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa menjadi tolak ukur dalam pengelolaan dana desa, karena aparatur desa yang kompeten akan lebih mudah menjalankan tugasnya serta dapat mengurangi penyimpangan yang bisa saja terjadi dalam pengelolaan dana desa (Pahlawan et

al., 2020). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semakin berkompeten seorang aparatur desa maka akuntabilitas pengelolaan dana akan semakin meningkat pula.

Selanjutnya faktor kedua yaitu mengenai sistem pengendalian internal. Menurut (Pahlawan et al., 2020) pengendalian internal bisa dikatakan sebagai salah satu faktor penting yang sangat dibutuhkan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan jumlah dana desa yang diberikan oleh pusat tidak selalu sama per tahunnya dan termasuk dalam jumlah yang signifikan (Pahlawan et al., 2020). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berkaitan dengan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga yang mempengaruhi variabel dependen yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintahan desa sebagai organisasi yang bergerak pada pemerintahan sektor publik memiliki banyak tugas yang dapat lebih mudah dikerjakan dengan bantuan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat sehingga perkembangan tersebut dapat meningkatkan kinerja dan melaksanakan berbagai kegiatan dengan cepat, tepat dan akurat serta berdampak positif dalam peningkatan produktivitas kerja (Nuryanto, 2012).

Selanjutnya faktor keempat yang juga mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu partisipasi masyarakat. Menurut (Indraswari & Rahayu, 2021) partisipasi masyarakat yaitu keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan wewenang oleh aparatur desa. Aparatur desa wajib memberikan informasi mengenai penggunaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan

desa serta melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dengan cara memberikan saran ataupun usulan terhadap dana yang digunakan (Pahlawan et al., 2020). Untuk itu dapat disimpulkan bahwasanya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor kelima yaitu berkaitan dengan kualitas penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan bersifat sangat penting karena laporan keuangan digunakan sebagai alat ukur sejauh mana kinerja telah dilaksanakan dan juga dijadikan sebagai bukti apakah kinerja dapat dikatakan akuntabel (Ramadhan & Arza, 2021). Pemerintah desa harus memberikan kemudahan akses bagi pengguna laporan keuangan serta menyajikan laporan keuangan dengan kualitas yang baik agar upaya menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana desa berjalan dengan baik (Triyono et al., 2019).

Sebelumnya, penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan et al, (2020) mengatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indraswari & Rahayu, (2021) yang mengatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh sistem pengendalian internal dimana Atiningsih & Ningtyas, (2019) mengatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Indraswari & Rahayu, (2021) hasilnya

mengatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kemudian penelitian yang lainnya yaitu Pahlawan et al., (2020) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian dari Aulia, (2018) mendapatkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih & Ningtyas, (2019) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmatullah et al., (2019) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pada faktor terakhir dari penelitian ini yaitu faktor kualitas penyajian laporan keuangan juga terdapat beberapa perbedaan hasil dari peneliti terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan & Arza, (2021) menyebutkan bahwa kualitas penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Triyono et al., (2019) yang menyebutkan bahwa kualitas penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi,

partisipasi masyarakat dan kualitas penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa se-Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang didasarkan pada jurnal penelitian dari Pahlawan et al., (2020) yang melakukan penelitian di desa yang berada di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini terdapat penambahan variabel independen yaitu Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, dimana penambahan variabel ini didasarkan pada jurnal penelitian Ramadhan & Arza, (2021). Variabel tersebut ditambahkan karena setiap pengelolaan dana selalu membutuhkan laporan keuangan sebagai bukti terjadinya transaksi. Sehingga kualitas penyajian laporan keuangan dalam setiap pengelolaan dana akan selalu dibutuhkan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana dalam hal ini yaitu pengelolaan dana desa. Selain itu, perbedaan yang lainnya mengenai tempat dan waktu dilaksanakan penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya terdapat beberapa perbedaan dari hasil penelitian terdahulu. Maka hal itulah yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Sehingga penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini didasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Maka dari itu, peneliti hanya memfokuskan pada beberapa faktor saja yaitu faktor Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. Selain itu, tempat penelitian ini dilaksanakan hanya pada desa se-Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati?
4. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati?

5. Apakah kualitas penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati?

1.4. Tujuan Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan sebuah informasi sebagai berikut :

1.5.1. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai sarana bagi peneliti untuk dapat meningkatkan wawasan terkait pengelolaan dana desa yang dilakukan pada desa-desa di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Sehingga peneliti dapat mengetahui apakah pemerintah desa benar-benar bertanggung jawab dengan pekerjaannya dalam mengelola dana desa tersebut.

1.5.2. Bagi Pemerintah Daerah/Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan *feedback* dari pemerintah untuk senantiasa melakukan peningkatan kinerja dalam melayani masyarakat desa tanpa adanya penyelewengan wewenang yang dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah masukan dan pertimbangan bagi para aparatur desa di masing-masing tempat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

1.5.3. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati terlaksana. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat ikut berpartisipasi membantu pemerintah desa dengan cara memberikan saran dan kritik yang membangun untuk kemajuan desa.